MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISKEUDES DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN PARE

Dwi Candrawati[1], Adhi Alfian[2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email : dwi20011@mail.unpad.ac.id[1], adhi.alfian@unpad.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Alasan dilakukannya penelitian ini karena adanya permasalahan dalam administrasi pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hal ini ditunjukkan dengan adanya gangguan atau *error* karena *bug* yang ada didalam aplikasi, penggunaan *database Microsoft Access* yang menyulitkan pengguna, dan jaringan internet yang tidak stabil sehingga mengganggu kelancaran aplikasi SISKEUDES. Tujuan dari penelitian ini untuk menilai efektivitas aplikasi SISKEUDES pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah pada indikator kualitas sistem saat penerapan aplikasi SISKEUDES, yaitu pada aspek kemudahan akses, keandalan, dan fleksibilitas sistem. Namun, indikator lainnya memberikan hasil yang efektif tanpa ditemukannya permasalahan yang signifikan. Hal ini didasarkan pada enak indikator menurut William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, yang dikenal sebagai *D&M IS Success Model* (1992), yang terdiri dari kualitas sistem *(system quality),* kualitas informasi *(information quality),* kualitas pelayanan *(service quality),* penggunaan *(use),* kepuasan pengguna *(user satisfaction),* dan manfaat bersih *(net benefit).*

Kata kunci: *Efektivitas, Laporan Keuangan Desa, SISKEUDES*

ABSTRACT

This research was conducted at the Village Government in Pare District, Kediri Regency, East Java. The reason for carrying out this research is because there are problems in the administration of village financial management using the Village Financial System (SISKEUDES) application. This is indicated by the presence of interference or errors due to bugs in the application, the use of Microsoft Access databases that make it difficult for users, and an unstable internet network that disrupts the

Article History
Received: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

smooth running of the SISKEUDES application. The purpose of this study was to assess the effectiveness of the SISKEUDES application in the Village Government in Pare District. The method used is qualitative with a case study approach. In this study, data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and documentation. The results showed that there were still some problems in the system quality indicators when implementing the SISKEUDES application, namely in the aspects of ease of access, reliability, and system flexibility. However, other indicators provide effective results without finding significant problems. This is based on the good indicators according to William H. DeLone and Ephraim R. McLean, known as the D&M IS Success Model (1992), which consists of system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction, and net benefits.
Keywords: *Effectiveness, Village Financial Reports, SISKEUDES*

PENDAHULUAN

Menurut Lastanti dan Salim (2019), sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam menjamin keakuratan dan transparansi pelaporan keuangan suatu instansi. Dengan menggunakan sistem informasi yang tepat, instansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat, terstruktur, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sehingga memudahkan para pihak terkait untuk memahami dengan jelas kondisi keuangan dan kinerja instansi. Sistem informasi akuntansi juga dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif, perencanaan strategis, serta alokasi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa diberi wewenang untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pengesahan Undang-Undang ini juga diikuti dengan pangalokasian dana desa. Laporan Perkembangan Ekonomi Fiskal Daerah yang dirilis pada Maret 2024 menjelaskan bahwa selama periode 2015-2023, transfer dana desa rata-rata meningkat setiap tahunnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Pengalokasian dana desa yang jumlahnya tidak sedikit ini dapat mengundang banyak risiko, salah satunya penyalahgunaan dana. Anggaran desa merupakan sumber utama korupsi, menurut penilaian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. Menurut sektor, kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi di sektor ini sebesar Rp233 miliar (Indonesia Corruption Watch, 2021).

Untuk memantau pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kemendagri telah merancang aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang sebelumnya dikenal sebagai SIMDA Desa (BPKP, 2015). Penggunaan aplikasi SISKEUDES diharapkan dapat meningkatkan otonomi desa, sehingga pemerintah desa dapat lebih mandiri dalam mengelola administrasi dan sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dana desa merupakan tanggung jawab penting bagi pemerintah desa untuk memastikan pengalokasian dana desa tepat sasaran dan transparan.

Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018, implementasi aplikasi SISKEUDES di Provinsi Jawa Timur telah mencapai 97,55%, yang akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Kominfo, 2018). BPKP Provinsi Jawa Timur menjelaskan langkah percepatan yang diambil untuk mengenalkan aplikasi SISKEUDES yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis di setiap Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dalam implementasinya, BPKP melihat kemajuan akuntabilitas pada awal implementasi SISKEUDES seperti berkurangnya kasus kepala desa yang melakukan penyelewengan dana dan pencairan dana desa secara teratur.

Sejak tahun 2019-2023, Provinsi Jawa Timur telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berarti laporan keuangan tersebut memberikan informasi yang bebas dari salah saji material (BPK Provinsi Jawa Timur, 2019). Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 pada Poin 33, disebutkan bahwa pemerintah desa wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota dan disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam LKPD. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini atas LKPD mengungkapkan apakah pelaksanaan APB Desa terhindar dari penyimpangan yang berarti.

Sebagaimana ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat Kabupaten di Jawa Timur yang mendapat opini WTP selama lima tahun berturut-turut, yaitu Kabupaten Kediri (BPK Provinsi Jawa Timur, 2019). Data dari Sistem Informasi Desa yang memuat Rincian Alokasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2023, Kecamatan Pare yang memiliki jumlah desa tergolong sedikit daripada kecamatan yang lain di Kabupaten Kediri, tetapi menerima alokasi dana desa yang cukup besar dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya (Sistem Informasi Desa, 2024). Besaran jumlah alokasi dana desa ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah desa. Jumlah alokasi dana desa yang besar membutuhkan pengawasan yang baik sehingga informasi mengenai Laporan Pertanggungjawaban dapat merefleksikan pengelolaan dana desa yang sebenarnya.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pare Tahun 2024 dijelaskan bahwa realisasi program dan kegiatan tahun 2023 tercapai sebesar 82,84% sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun, capaian tersebut tidak terlepas dari adanya permasalahan yang terjadi tahun sebelumnya pada saat pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Berdasarkan penuturan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Bidang Bina Pemerintah Desa, hambatan terbesar dalam mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri, yaitu terdapat operator yang masih belum siap dan belum terbiasa dalam menggunakan teknologi atau sistem komputer seperti aplikasi SISKEUDES. Selain itu, pihak desa merasa akun-akun yang terdapat dalam aplikasi SISKEUDES tidak mengakomodir kegiatan secara

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keseluruhan, padahal akun-akun dalam aplikasi tersebut memang sengaja dibuat umum dan tidak dibuat spesifik supaya bisa menyesuaikan dengan kegiatan desa.

Salah satu kecamatan yang perlu disoroti mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES yaitu Kecamatan Pare. Dengan mayoritas operator SISKEUDES yang tingkat pendidikannya SLTA sederajat dibandingkan dengan kecamatan lain, maka dikhawatirkan akan berdampak pada implementasi semua komponen sistem dalam menghasilkan *output* yang berkualitas. Selain permasalahan SDM, aplikasi SISKEUDES terkadang juga sering mengalami *error* pada saat penginputan anggaran belanja, seperti terjadi ketidakcocokan pada *output* yang dicetak. Pada saat penginputan, operator sudah memasukkan dana desa sebagai sumber pendanaannya, akan tetapi saat dicetak justru muncul beberapa sumber pendanaan dari kegiatan belanja tersebut. Selain itu, seringkali muncul *bug error* saat penginputan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Adanya permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat kinerja perangkat desa dalam menyelesaikan dokumen dan laporan keuangan desa sesuai target waktu yang ditentukan.

Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aplikasi SISKEUDES akan dilakukan peningkatan *(update)* sistem setiap tahunnya. Peningkatan *(update)* sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan fitur dan *output* yang dihasilkan oleh aplikasi. Namun, dalam penerapannya justru peningkatan *(update)* tersebut mengambat kinerja perangkat desa yang bertugas mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dalam beradaptasi untuk memahami peningkatan pada pengoperasian aplikasi tersebut.

Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, namun pemerintah daerah juga telah memfasilitasi pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi perangkat desa yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES dengan memberikan pelatihan berupa bimbingan teknis (bimtek). Bimtek merupakan program yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri agar perangkat desa mampu menyusun laporan keuangan desa sebagai salah satu *output* dari aplikasi SISKEUDES secara tepat, akurat, dan transparan.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui pada lokasi penelitian diatas, ternyata juga menjadi kajian dalam beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian oleh Indriati Reni (2019) yang meneliti mengenai efektivitas penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron, yang menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES versi terbaru berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyaningsih dkk., (2023) tentang efektivitas dan efisiensi penerapan SISKEUDES di Kabupaten Wonosobo, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai dampak yang positif dan berdampak signifikan terhadap penerapan SISKEUDES. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan perangkat desa karena menu-menu yang disediakan mampu memberikan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun menu perencanaan tetap dilakukan dalam mode *offline* (Hayati et al.,2021).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Untuk menggambarkan efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES tentunya diperlukan suatu analisis. Salah satu model yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan sistem informasi adalah Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (1992). Dalam model yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean terdapat enam indikator yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan sistem informasi. Indikator tersebut meliputi kualitas sistem *(system quality*), kualitas informasi *(information quality),* kualitas pelayanan *(service quality),* penggunaan *(use),* kepuasan pengguna *(user satisfaction)*, dan manfaat bersih yang didapat *(net benefit).*Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini akan berfokus pada efektivitas sistem informasi yang terdapat pada aplikasi SISKEUDES dalam menghasilkan *output* berupa laporan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Bodnar dan Hopwood (2013) Sistem informasi akuntansi adalah sebuah rangkaian sumber daya yang melibatkan manusia dan peralatan yang bertujuan untuk mengolah berbagai jenis data, termasuk data keuangan, menjadi informasi yang berguna. Sedangkan, menurut Turner et al., (2017) Sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang mengumpulkan data akuntansi dari berbagai proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, serta mengolah data secara rinci dengan melakukan klasifikasi, ringkasan, konsolidasi, dan pelaporan data akuntansi yang disesuaikan ke berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Berdasarkan definisi tersebut, sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai sekumpulan kerangka kerja yang terdiri dari data, sumber daya manusia, jaringan dan teknologi yang terintegrasi untuk digunakan dalam mengelola data keuangan organisasi.

E-Government

E-Government (*Electronic Government)* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang mengandalkan kekuatan teknologi digital. Dalam konsep ini, semua aspek administrasi, pelayanan kepada masyarakat, pengawasan, dan manajemen sumber daya organisasi seperti keuangan, pajak, retribusi, diintegrasikan ke dalam satu sistem terpadu. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi efisiensi operasional, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government merupakan salah satu landasan penting dalam pengembangan *e-government* di Indonesia. Beberapa poin penting dalam Inpres ini meliputi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam seluruh aspek pemerintahan Indonesia dengan berfokus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pentingnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta dikelola

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penjelasan mengenai setiap tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu:

a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota.
c. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dalam tahapan penatausahaan, wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
d. Pelaporan merupakan tahapan saat kepala desa melaporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama yang telah dibuat kepada bupati/wali kota paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan.
e. Pertanggungjawaban merupakan tahapan saat laporan realisasi APB Desa dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah suatu aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pembuatan aplikasi ini berkaitan dengan persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. SISKEUDES sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama SIMDA Desa, mulai diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal pelaporan keuangan, SISKEUDES memudahkan pemerintah desa untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah. Dengan akses mudah terhadap data keuangan yang terintegrasi, laporan tersebut menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya. Hal ini mendukung upaya pemerintah desa dalam menjaga kredibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan desa disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan yang lain. Penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010. Komponen utama laporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan tersebut merupakan *output* dari tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Menurut Ratmono (2015) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdapat empat karakteristik kualitatif yang merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Model Kesukesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (1992)

Model Kesuksesan Sistem Informasi *Delone and McLean* merupakan model yang dikemukakan oleh Wiliam H.Delone dan Ephraim R.McLean pada tahun 1992. Model ini terdiri dari enam indicator yaitu *system quality*, *information quality*, *use*, *user satisfaction*, *service quality*, dan *net benefit*,. Model kesuksesan ini banyak digunakan untuk menganalisis implementasi sebuah sistem informasi.

a. Kualitas Sistem *(System Quality)*

   Kualitas sistem adalah kemampuan atau performa sistem dalam menyediakan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Aspek-aspek yang mempengaruhi adalah kemudahan untuk digunakan *(ease of use)*, keandalan sistem *(reliability)*, kecepatan akses *(response time)*, fleksibilitas sistem *(flexibility)* dan keamanan sistem *(security)*.

b. Kualitas Informasi *(Information quality)*

   Untuk menilai suatu kualitas informasi dapat menggunakan lima aspek yaitu akurasi *(accuracy)*, ketepatan waktu *(timeliness)*, kelengkapan *(completeness)*, relevansi *(relevance)*, dan penyajian informasi *(format display information)*. Kualitas informasi menunjukkan kualitas output yang dihasilkan oleh sistem informasi. Semakin baik kualitas informasi akan semakin mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna.

c. Kualitas Pelayanan *(Service Quality)*

   Untuk menilai suatu kualitas pelayanan dapat menggunakan dua aspek yaitu pembaruan sistem *(system update)* dan keamanan arsip data.

d. Penggunaan *(Use)*

   Penggunaan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Aspek ini diukur dengan indikator yang digunakan yang terdiri dari seberapa sering pengguna *(user)* menggunakan sistem informasi tersebut *(frekuensi of use)*, kesesuaian penggunaan, dan kegunaan penggunaan.

e. Kepuasan Pengguna *(User Satisfaction)*

   Kepuasan pengguna didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan dari pengalaman yang dirasakan oleh pengguna sistem dan dampak potensial dalam menggunakan sistem informasi (Setyo dan Rahmawati, 2015). Semakin tinggi kepuasan pengguna maka *individual impact* atau kinerja individu yang terjadi akan semakin tinggi (Suarta dan Sudiadnyani, 2015).

f. Manfaat Bersih *(Net Benefit)*

   Manfaat-manfaat bersih merupakan dampak *(impact)* keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kerja secara individual maupun organisasi termasuk didalamnya produktivitas, meningkatkan *outcome*, dan meningkatkan kinerja pekerjaan pengguna. Aspek yang digunakan untuk mengukur *net benefit* adalah produktivitas, *outcome*, dan kinerja sistem.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini akan berfokus pada dua subjek penelitian yaitu, Perangkat Desa di Kecamatan Pare selaku pengelola keuangan desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku pihak yang menyelenggarakan bimbingan teknis atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan di tingkat desa. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Adapun pihak yang akan dijadikan narasumber yaitu Perangkat Desa di Kecamatan Pare dan Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati penggunaan aplikasi SISKEUDES, terutama pada proses penyusunan laporan keuangan desa, sehingga dapat memahami bagaimana aplikasi tersebut beroperasi. Sedangkan wawancara dilakukan kepada Perangkat Desa di Kecamatan Pare, yaitu pada kepala desa dan operator SISKEUDES selaku penanggung jawab penyusunan laporan keuangan desa. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan keuangan desa di Kecamatan Pare, jurnal penelitian, buku dan sumber yang memuat topik penelitian.

Pada uji kredibilitas data, peneliti berfokus pada aspek triangulasi dan *member check* sebagai pengujian keabsahan data. Selanjutnya, analisis data akan menggunakan analisis data model Miles and Huberman, yang terdiri dari *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion/verification* (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Penelitian ini akan meneliti mengenai Efektivitas dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk menggambarkan efektivitas SISKEUDES dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang diungkapkan oleh DeLone dan McLean pada tahun 1992 mengenai Model Kesuksesan Sistem Informasi. Indikator-indikator yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean membentuk sebuah hubungan yang saling terikat satu sama lain. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kualitas Sistem *(System Quality)*
b. Kualitas Informasi *(Information Quality)*
c. Kualitas Pelayanan *(Service Quality)*
d. Penggunaan *(Use)*
e. Kepuasan pengguna *(User Satisfaction)*
f. Manfaat Bersih *(Net Benefit)*

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kualitas Sistem *(System Quality)* dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Kualitas sistem memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana proses sistem berjalan dan seberapa baik sistem tersebut mendukung kebutuhan pengguna. Untuk menggambarkan kualitas sistem dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), terdapat lima aspek yang dijadikan acuan analisis. Berdasarkan penelitian pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, didapatkan hasil berupa:

a. Kemudahan akses penggunaan aplikasi SISKEUDES dipengaruhi oleh tingkat kompetensi operator dalam beradaptasi dengan aplikasi. Operator yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik cenderung dapat memanfaatkan fitur-fitur baru dengan lebih cepat dan efektif tanpa harus selalu melihat tutorial pada buku panduan dan Youtube, sehingga meningkatkan produktivitas dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, faktor lain yang menghambat kemudahan akses aplikasi SISKEUDES adalah keberadaan *bug* dalam aplikasi SISKEUDES. Di sisi lain, penggunaan bahasa yang jelas dan istilah yang familiar dalam aplikasi serta buku panduan dapat sangat membantu operator dalam memahami fungsionalitas aplikasi dengan cepat.

b. Keandalan sistem pada aplikasi SISKEUDES mengacu pada ketersediaan perangkat keras *(hardware)* dan perangkat lunak *(software)* pendukung aplikasi yang digunakan. Perangkat pendukung yang ada di beberapa pemerintah desa belum sepenuhnya mendukung pengoperasian aplikasi SISKEUDES dengan optimal. Sehingga aspek ketersediaan sistem informasi yang seharusnya diharapkan dari aplikasi tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menjalankan aplikasi SISKEUDES sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi terkait dengan infrastruktur teknologi yang mendukung.

c. Kecepatan akses pada aplikasi SISKEUDES terlihat dari penginputan data yang cepat dan ketepatan data, adanya *template* yang dapat digunakan dalam penyusunan dokumen ataupun laporan keuangan desa, integrasi pelaporan dan pertanggungjawaban dengan pemerintah pusat, serta menyedikan mode *online* dan *offline* yang membantu pengguna dalam mengakses aplikasi tersebut.

d. Fleksibilitas sistem pada aplikasi SISKEUDES menggunakan sistem informasi berbasis dekstop *(desktop-based information system).* Penggunaan *desktop-based information system* membawa beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah kebutuhan akan perangkat komputer dengan spesifikasi khusus untuk menjalankannya, berbeda dengan sistem berbasis web yang lebih fleksibel dalam hal kompatibilitas perangkat. Sementara itu, mengenai pembaharuan pada aplikasi SISKEUDES dilakukan setiap tahunnya yang menjadikan aplikasi menjadi lebih baik dengan adanya penambahan, perubahan, dan perbaikan pada sistem.

e. Keamanan sistem pada aplikasi SISKEUDES dapat dilihat berdasarkan *password* yang digunakan untuk mengakses aplikasi. *Password* pada aplikasi hanya diperuntukkan bagi operator tingat desa, supervisor tingkat kecamatan, dan administrator tingkat kabupaten. Masing-masing *password* tersebut hanya diberikan kepada satu orang. Selain mengenai *password* yang dibuat beragam, akses terhadap berbagai menu di aplikasi SISKEUDES juga diatur dengan ketat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pengguna.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kualitas Informasi *(Information Quality)* dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Setiap organisasi menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, tidak terkecuali pada sektor pemerintah. Jenis informasi ini dapat berupa laporan keuangan, dokumen administratif, data analisis, dan berbagai bentuk informasi lainnya yang mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah diakses menjadi penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Untuk mengetahui kualitas informasi dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare dapat dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek yang dapat merepresentasikan kualitas informasi yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, didapatkan hasil berupa:

a. Akurasi informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SISKEUDES mampu menghasilkan dokumen dan laporan keuangan desa dari proses tahapan pengelolaan keuangan desa secara akurat selama tahun anggaran 2024 maupun tahun sebelumnya. Meskipun masih terdapat permasalahan pada beberapa desa karena sistem yang terkendala dan jaringan yang tidak stabil, hal tersebut tidak merubah hasil dari *output* yang dihasilkan. Sehingga kedepannya masih dapat diperbaiki lagi agar permasalahan serupa dapat diminimalisir.

b. Ketepatan waktu pada aplikasi SISKEUDES terlihat dari penyajian dokumen dan laporan keuangan desa secara langsung dengan proses pengunduhan yang bervariasi. Namun harus diperhatikan juga terkait ketersediaan jaringan yang kuat dan memadai.

c. Kelengkapan informasi yang tersedia dalam aplikasi SISKEUDES telah disesuaikan dengan peraturan terbaru yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, aplikasi SISKEUDES dapat memastikan bahwa semua informasi yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Hal ini mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan desa secara sistematis, pelaporan yang tepat waktu, serta pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

d. Relevansi informasi pada aplikasi SISKEUDES terlihat aplikasi SISKEUDES yang mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena informasi yang terdapat dalam sistem tersebut diinput oleh pengguna yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, keberadaan regulasi yang jelas dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, memastikan bahwa pengguna SISKEUDES telah ditetapkan tugas pokok dan fungsinya secara jelas.

e. Penyajian informasi pada aplikasi SISKEUDES menghasilkan format laporan yang telah sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aplikasi SISKEUDES mampu menyajikan format laporan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai pengelolaan keuangan desa, serta memenuhi berbagai aspek penting dalam penyajian informasi keuangan.

Kualitas Pelayanan *(Service Quality)* dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Kualitas pelayanan dari sistem informasi, seperti yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (1992), tidak hanya mencakup kualitas pelayanan dari sistem informasi itu sendiri, tetapi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

juga kualitas pelayanan dari penyedia atau pengembang sistem informasi. Pengembang sistem informasi ini dinilai berdasarkan sejauh mana kontribusi dari organisasi yang mengembangkan sistem informasi tersebut. Kontribusi yang dimaksud adalah kemampuan pengembang organisasi dalam menyediakan nilai tambah terhadap sistem informasi melalui pelayanan yang diberikan. Untuk melihat kualitas pelayanan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka diperlukan aspek-aspek yang dapat menggambarkan kualitas pelayanannya. Aspek-aspek tersebut adalah pembaharuan pada sistem dan keamanan arsip. Berdasarkan penelitian pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, didapatkan hasil berupa:

a. Aplikasi SISKEUDES rutin melakukan pemeliharaan dengan adanya pembaharuan sistem yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari pemeliharaan tersebut untuk terus meningkatkan efisiensi dari aplikasi. Dengan melakukan pembaharuan secara berkala, pemerintah desa dapat memastikan bahwa aplikasi SISKEUDES tetap relevan dan mampu mendukung pengelolaan keuangan desa secara optimal. Pemeliharaan rutin pada aplikasi SISKEUDES juga mencakup peningkatan kecepatan, optimisasi *database*, dan perbaikan antarmuka pengguna agar lebih efektif dan efisien.

b. Keamanan arsip yang digunakan pada aplikasi SISKEUDES yaitu dengan melakukan *backup* data secara rutin. *Backup* data dapat dilakukan sebelum jam kerja selesai agar data-data yang telah diinput sebelumnya dapat dilanjutkan keesokan harinya tanpa khawatir kehilangan data. *Backup* data dilakukan untuk mempermudah dalam mengakses kembali data yang sebelumnya telah dikerjakan namun belum selesai ataupun dicek kembali. Selain *backup database*, metode *compact and repair database* juga dapat digunakan dalam mengamankan arsip data. Proses *compact and repair database* dilakukan untuk mengurangi ukuran *database* dengan menghapus ruang kosong dan memperbaiki struktur data yang mungkin rusak atau terfragmentasi.

Penggunaan *(Use)* dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sistem informasi yang wajib digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dengan efektif. Sistem ini mencakup beberapa tahapan penting seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Maksud penggunaan dari aplikasi SISKEUDES menjadi komponen penting dalam menilai efektivitasnya pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare. Dalam menggambarkan maksud penggunaan dari aplikasi Sistem SISKEUDES pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu sifat penggunaan, kesesuaian penggunaan, dan kegunaan sistem.

a. Sifat penggunaan dapat diketahui dari rata-rata waktu yang dihabiskan setiap harinya dalam mengakses aplikasi SISKEUDES serta bagaimana aplikasi ini terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare, penggunaan aplikasi SISKEUDES digunakan setiap hari dalam membantu pengelolaan keuangan desa.

b. Kesesuaian penggunaan pada aplikasi SISKEUDES yaitu dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung pembuatan dokumen dan laporan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini mengamanatkan bahwa pemerintah desa harus menyusun

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dan melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) beserta CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan) setiap tahunnya. Proses penyusunan laporan ini meliputi beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam aplikasi SISKEUDES, semua tahapan pengelolaan keuangan desa telah dipersiapkan dengan baik, sehingga memungkinkan operator untuk melakukan penginputan data secara sistematis sesuai dengan kebutuhannya.

c. Kegunaan aplikasi SISKEUDES tidak hanya memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku, tetapi juga memberikan dukungan yang signifikan dalam mempermudah pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

Kepuasan Pengguna *(User Satisfaction)* dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kepuasan pengguna dapat dilihat dari tingkat kepuasan operator terhadap kinerja dan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem, serta kesesuaian antara ekspektasi yang dimiliki operator dengan pengalamannya menggunakan aplikasi SISKEUDES. Pengguna aplikasi SISKEUDES pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare umumnya merasa puas dengan aplikasi ini. Hal ini didasarkan pada penuturan dari keseluruhan operator aplikasi SISKEUDES yang menyatakan bahwa aplikasi tersebut telah sesuai dalam memenuhi ekspektasinya untuk membantu mengelola keuangan desa secara akurat dan handal. Meskipun mengalami sedikit kesulitan saat awal penggunaan, operator merasa bahwa aplikasi SISKEUDES telah memberikan kinerja yang memuaskan secara keseluruhan. Operator aplikasi SISKEUDES juga merasa bahwa fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi SISKEUDES telah memudahkan pekerjaannya dalam melakukan penginputan data terkait perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa.

Manfaat Bersih *(Net Benefit)* dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Manfaat dari sistem informasi dapat dilihat dari kualitas *output* yang dihasilkan oleh sistem dan *outcome* yang tercapai oleh pengguna. Dalam menggambarkan manfaat yang dihasilkan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat dilihat berdasarkan tiga aspek, diantaranya:

a. Produktivitas operator yang mengoperasikan aplikasi SISKEUDES pada pemerintah desa di Kecamatan Pare merasa lebih produktif dalam melaksanakan pekerjaannya ketika menggunakan aplikasi SISKEUDES dibandingkan dengan tanpa menggunakan aplikasi tersebut.

b. Peningkatan *outcome* yang dihasilkan aplikasi SISKEUDES telah memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keluangan desa yang berkualitas. Aplikasi SISKEUDES tidak hanya mempermudah proses administratif di desa, tetapi juga secara langsung meningkatkan kinerja operator desa dalam mengelola keuangan desa.

c. Aplikasi SISKEUDES membantu dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah desa dengan menyediakan informasi yang akurat dan terstruktur terkait

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya aplikasi SISKEUDES, pemerintah desa merasa lebih mampu dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran desa dengan lebih efektif.

Kekurangan dan Kendala dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Berdasarkan penuturan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bidang Bina Pemerintah Desa Kabupaten Kediri, terdapat beberapa hambatan dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Kediri, terutama di Kecamatan Pare, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesiapan dan kebiasaan operator dalam menggunakan teknologi atau sistem komputer seperti SISKEUDES. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, upaya peningkatan kompetensi operator dilakukan melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan dengan bantuan dari DPMPD Kabupaten Kediri. Pelaksanaan bimtek dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan operator dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES dengan lebih efektif. Sehingga, operator-operator tersebut mulai menjadi lebih terampil dan mampu mengelola keuangan desa menggunakan SISKEUDES secara lebih kompeten. Selain permasalahan mengenai SDM yang menjadi kendala utama, pengoperasian aplikasi SISKEUDES yang menggunakan *database Microsoft Access* dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi kekurangan tersendiri. Jika perangkat komputer yang digunakan oleh operator tidak terinstall *Microsoft Office 2003*, penggunaan fitur ini menjadi tidak memungkinkan untuk digunakan tanpa tambahan instalasi. Selain permasalahan mengenai kendala dan kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kendala tambahan dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare. Kendala tersebut yaitu ketersediaan jaringan internet yang sering tidak stabil. Hal ini menjadi hambatan serius karena aplikasi SISKEUDES memerlukan koneksi internet yang baik untuk menjalankannya dengan lancar.

KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, berdasarkan pengukuran efektivitas sistem informasi menurut William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, yang dikenal sebagai *D&M IS Success Model* (1992), dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pare belum dapat dikatakan efektif karena masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya, keberadaan *bug* dalam aplikasi SISKEUDES yang mempengaruhi kemudahan akses, perangkat pendukung yang ada di Desa Sumberbendo dan Desa Bendo belum mendukung pengoperasian aplikasi SISKEUDES dengan optimal yang mempengaruhi keandalan sistem, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES yang masih bersifat *desktop-based* memberikan batasan yang signifikan terhadap penggunaannya yang mempengaruhi fleksibilitas sistem. Sementara itu, aspek-aspek yang mendukung penerapan aplikasi SISKEUDES yaitu:

a. Penggunaan bahasa yang jelas dan istilah yang familiar dalam aplikasi serta buku panduan dapat sangat membantu operator dalam memahami fungsionalitas aplikasi dengan cepat.
b. Ketersediaan fitur penginputan data yang cepat dan ketepatan data sesuai dengan permintaan pengguna, adanya *template* yang dapat digunakan dalam penyusunan dokumen ataupun laporan keuangan desa, integrasi pelaporan dan pertanggungjawaban dengan pemerintah pusat, serta menyediakan mode *online* dan *offline* yang membantu pengguna dalam mengakses aplikasi.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

c. Pembaharuan yang dilakukan pada aplikasi SISKEUDES, yang terjadi setiap tahun menjadikan aplikasi menjadi lebih baik dengan adanya penambahan, perubahan, dan perbaikan pada sistem.
d. Penggunaan beragam *password* yang disesuaikan dengan tingkat akses dan wewenang pengguna.
e. Dokumen maupun laporan keuangan desa dari proses tahapan pengelolaan keuangan desa telah secara akurat selama tahun anggaran 2024.
f. Aplikasi SISKEUDES mampu menyajikan dokumen dan laporan keuangan desa secara langsung dengan proses pengunduhan yang bervariasi.
g. Dokumen dan laporan keuangan desa yang dihasilkan telah berdasar pada peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
h. Terdapat fitur *backup* data untuk memulihkan data yang telah dibuat sebelumnya.

Selain itu, juga terdapat kendala diluar sistem yang menghambat penggunaan aplikasi SISKEUDES. Kendala tersebut diantaranya, kurangnya kesiapan dan kebiasaan operator dalam menggunakan teknologi atau sistem komputer seperti SISKEUDES, penggunaan *database Microsoft Access* dalam pengelolaan keuangan desa yang mengharuskan melakukan untuk tambahan instalasi jika tidak menggunakan *Microsoft Office 2003*, dan ketidakstabilan jaringan internet dapat mengganggu kelancaran proses penginputan data.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus : Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, *2*(2), 54–61. https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2013

Antia Falo, Y. (2024). *Evaluasi efektivitas penerapan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di Desa Benus Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara)*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, *3*(01), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951

Auliantari, B. F., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Di Desa Jatisela. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *2*(3), 416–433. https://doi.org/10.29303/risma. v2i3.255

BPK. (2020). *BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Jatim TA 2019*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2021). *BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Jatim TA 2020*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2022). *BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Jatim TA 2021*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

BPK. (2023). *BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Jatim TA 2022.* https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2024). *BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Jatim TA 2023*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2020). *LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2019 – WTP*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2021). *LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 – WTP*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2022). *LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – WTP*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2023). *LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2022 – WTP*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2024). *LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2023 – WTP*. https://jatim.bpk.go.id, diakses 1 Juli 2024

BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultas Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta : Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.* http://www.bpkp.go.id/, diakses 1 Juli 2024

BPKP. (2015). *Pengawalan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes*. http://www.bpkp.go.id/, diakses 1 Juli 2024

BPK. (2017*). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2017*. http://www.bpkp.go.id/, diakses 1 Juli 2024

BPKP. (2017). *Percepatan Implementasi SISKEUDES Provinsi Jambi*. http://www.bpkp.go.id/, diakses 1 Juli 2024

BPKP dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian dalam Negeri. *Leaflet Sistem Keuangan Desa.* http://www.bpkp.go.id/, diakses 1 Juli 2024

DeLone, McLean. (1992). *Information System Success: The Quest fo the Dependent Variabel.* Information System Research 3(1), h. 60 - 95

ICW. (2021). *Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*.https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021, diakses 1 Juli 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Rencana Kerja Kecamatan Pare Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa